

# ANALISIS PEMETAAN WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN BELANJA MODAL, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN

**Hari Adria, Akhirmen, Melti Roza Adry**

Jurusan Ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Barat PADANG Telp. 445089  
Fax (0751) 447366, e-mail info @fe.unp.ac.id  
[hariadria@gmail.com](mailto:hariadria@gmail.com)

**Abstract :** *The aims of this research to mapping of the region in West Sumatera Province based on capital expenditure with economic growth and capital expenditure with poverty, this research is descriptive analysis which is described in the form of quadrant table and klassen tripology analysis, where grouping based on capital expenditure with economic growth yields that from in 2011 to 2016 the district / city average in West Sumatra is in the worst quadrant of the fourth group, where capital expenditure is low and low economic growth is Pesisir Selatan District, Sijunjung Regency, Tanah Datar Regency, Padang Pariaman Regency, Agam Regency, Pasaman, South Solok District and Pariaman City. Furthermore, grouping based on capital expenditure with poverty resulted that from 2011 to 2016 the average of Regency / city in West Sumatera was in the first group I quadrant not yet ideal, where high capital expenditure has not been able to reduce poverty level such as Mentawai Islands Regency, Pesisir Selatan Regency, 50 Kota Regency, Pasaman Regency, Pasaman Barat Regency.*

**Keywords :** *capital expenditures, economic growth and proverty*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemetaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal dengan kemiskinan, penelitian ini adalah analisis deskriptif yang dideskripsikan dalam bentuk tabel kuadran dan Analisis tripologi klassen, dimana pengelompokkan berdasarkan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi menghasilkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada pada kuadran IV kelompok yang paling buruk, dimana belanja modal rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten PadangPariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Pariaman. Selanjutnya pengelompokkan berdasarkan belanja modal dengan kemiskinan menghasilkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada pada kuadran I kelompok belum ideal, dimana belanja modal yang tinggi belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.*

**Kata Kunci:** *belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan*

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Pembangunan perekonomian dalam suatu negara, pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian dan

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam kurun waktu tertentu, karena umumnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output.

Selain itu kemiskinan pada dasarnya merupakan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut dapat ditemukan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Brueckner (2017) di ASEAN menemukan bahwa dampak kenaikan kelas menengah terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada tingkat awal PDB per kapita. Di sebagian besar negara ASEAN, kenaikan kelas menengah yang tidak terkait dengan pertumbuhan PDB per kapita akan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi untuk tingkat GDP per kapita ekonomi ASEAN pada tahun 1970. Sebaliknya, untuk nilai-nilai baru-baru ini dari PDB per kapita kenaikan kelas menengah akan memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB per kapita di ASEAN. Kami menunjukkan bahwa investasi merupakan saluran penting dimana pendapatan dari kelas menengah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Cruz (2017) di Brasil menemukan bahwa Mengatur angka usia penduduk membuat lintasan pembangunan di banyak negara, membawa peluang dan tantangan. Sementara penuaan menjadi masalah ekonomi menengah ke atas dan berpenghasilan tinggi, pertumbuhan populasi yang cepat akan terus berlanjut di negara-negara miskin selama beberapa dekade mendatang. Pada saat yang sama, negara-negara ini akan melihat peningkatan yang berkelanjutan dalam proporsi usia kerja penduduk mereka, dan pergeseran ini berpotensi untuk mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.

Holmgren (2017) di Norway menemukan bahwa Investasi di bidang infrastruktur sering dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan ekonomi, di tingkat regional, nasional maupun internasional. Berinvestasi di bidang infrastruktur sering dijadikan solusi untuk sejumlah masalah seperti pengangguran, depopulasi daerah pedesaan dan rendahnya aktivitas ekonomi.

Pemerintah berusaha membuktikan prioritas pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan membuat kebijakan pengadaan barang/jasa yang ternyata dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menyita banyak kalangan. Sebagai tanda kesungguhnya, maka pemerintah menganggarkan belanja modal yang cukup, sebagian besar dari dana tersebut diperuntukkan dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah. Namun disini bukan berarti tidak ada masalah, permasalahan yang muncul disini adalah masalah manajemen dan ketidaksiapan aparat atau pejabat pengelolaan anggaran dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Fenomena ini juga memberikan dampak terhadap penyerapan dana APBN khususnya dari belanja modal yang jauh dari harapan. Karena jika

penyerapan dana rendah maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat di harapkan dapat mencapai kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebesar 5,99persen. Rata-rata Laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 5,36persen. Sedangkan belanja modal Kabupaten Kepulauan Mentawai tergolong tinggi yaitu sebesar 19,16 persen. Hal ini disebabkan karena masalah manajemen dan ketidaksiapan aparat atau pejabat pengelolaan anggaran dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai.

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu di Kota Payakumbuh sebesar 6,47 persen. Hal ini disebabkan karena belanja modal di Kota Payakumbuh tergolong tinggi yaitu sebesar 23,99 persen. Sehingga dengan meningkatnya belanja modal maka pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh menjadi tinggi. Belanja modal memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi belanja modal maka pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga akan semakin tinggi.

Selain pertumbuhan ekonomi, masalah makro ekonomi lainnya adalah kemiskinan tinggi rendahnya kemiskinan juga tergantung pada besarnya alokasi belanja modal di suatu wilayah. Pada prinsipnya kemiskinan menggambarkan kondisi dimana terjadi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya tingkat pendapatan, atau kemiskinan ini menggambarkan suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan dan sandang.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir. Rata-rata laju tingkat kemiskinan tertinggi selama tahun 2011 sampai 2016 yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 16,21 persen. Tingginya tingkat kemiskinan ini disebabkan karena Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah kepulauan sehingga mata pencarian pada Kepulauan Mentawai rata-rata sebagai nelayan dan kurangnya keterampilan masyarakat dalam meningkatkan sumber mata pencariannya. Tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah dan tingkat kesehatan yang kurang memadai serta rendahnya pendapatan masyarakat.

Tingkat kemiskinan terendah yaitu Kota Sawahlunto sebesar 2,25 persen, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada belanja modal di kota Sawahlunto yaitu sebesar 25,69 persen. Dengan tingginya belanja modal maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah karena belanja modal memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan.

Dilihat dari rata-rata pertumbuhan belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berfluktuasi selama periode 2011 sampai 2016. Pada tabel 3 dapat memperlihatkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat menjadi daerah dengan rata-rata laju pertumbuhan belanja modal tertinggi yaitu sebesar 52,75 persen, sedangkan rata-rata laju pertumbuhan belanja modal terendah yaitu Kota Bukittinggi sebesar 8,2 persen.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari suatu proses pembangunan. Proses pembangunan ekonomi pada hakeketnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Mardiasmo (2002) dalam Dini Arwati menyatakan bahwa pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang kemudian mendorong daerah untuk mengalokasikan belanja modal secara lebih efisien. Dengan demikian ketika pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan maka belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga akan meningkat (Arwati,2013). Theory Keynes dalam (Mankiw, 2007:274). Teori ini menguraikan bahwa Setiap pengeluaran yang dilakukan berimplikasi pada penerimaan pendapatan yang lebih besar.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Maksum 2003 dalam Maabuat (2016). Ragnar Nurkse 1953 dalam Jhingan (2012:33-34) yang mengatakan: “Lingkaran setan mengandung arti deretan melingkar yang dapat dilihat dari 2 sudut pandang : dilihat dari sudut permintaan dijelaskan sebagai berikut: rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasi pun rendah. Tingkat investasi yang rendah kembali menyebabkan modal kurang dan produktivitas rendah.

Jika dilihat dari sudut penawaran: produktivitas rendah tercermin di dalam pendapatan yang rendah. Pendapatan rendah berarti tingkat tabungan juga rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat investasi rendah dan modal kurang. Kekurangan modal pada gilirannya bermuara pada produktivitas yang rendah). Hal ini yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap pembangunan yang terjadi pada negara sedang berkembang.

Belanja pemerintah untuk layanan kesehatan dan pendidikan dasar dan beberapa jenis infrastruktur (misalnya, jalan pedesaan, air dan sanitasi, perumahan) juga dipertimbangkan untuk mengurangi kemiskinan, dengan meningkatkan produktivitas dan potensi pendapatan rumah tangga miskin (McKay, 2004; Mosley et al., 2004; Paternostro, Rajaram, & Tiongson, 2007)

### **Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005).

Belanja modal atau belanja Infrastruktur publik (didefinisikan sebagai instalasi fisik seperti jalan raya dan jalan, bandara, fasilitas telekomunikasi, sistem pasokan air, listrik, fasilitas pengolahan limbah dan sejenisnya) diyakini memberikan layanan yang merupakan bagian dari kumpulan dan kumpulan konsumsi masyarakat. modal dan tenaga kerja sebagai masukan dalam proses produksi (Ayogu, 2007).

Wagner dalam Guritno (2002:171-172). mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

### **Pemetaan Wilayah**

Metode kuadran digunakan untuk menampilkan peta kemampuan keuangan daerah, masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai *Share* dan *Growth*, dengan nilai

share dan growth maka masing-masing daerah akan di bagi menjadi empat bagian, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. (Bappenas, 2003)

Menurut (Sjafrizal, 2008:7) Untuk dapat mewujudkan analisa teori yang baik dan harmonis, konsep wilayah (region) digunakan sebagai representasi dari unsur ruang (space). Dalam hal ini, region diartikan sebagai suatu kesatuan ruang yang dikelompokkan berdasarkan unsur tertentu tergantung dari tujuan analisa. Unsur tertentu tersebut dapat menyangkut dengan kondisi sosial, ekonomi maupun berkaitan antara wilayah. Bahkan pengelompokkan wilayah dapat pula dilakukan tidak berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi pertimbangan kemampuan administrasi pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Analisis Kuadran**

Metode kuadran digunakan untuk menampilkan peta kemampuan keuangan daerah, masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai belanja modal dan pertumbuhan ekonomi serta belanja modal dan belanja modal serta kemiskinan, maka masing-masing daerah akan di bagi menjadi empat bagian, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4.

### **Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi**

Kuadran I adalah kuadran yang terletak pada kanan atas mempunyai ciri-ciri tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun relatif tinggi dan tingkat belanja modal relatif tinggi pula.

Kuadran II adalah kuadran yang terletak pada kiri atas mempunyai ciri-ciri tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun relatif rendah, sedangkan tingkat belanja modal relatif tinggi.

Kuadran III adalah kuadran yang terletak pada kiri bawah atau pada sebelah mempunyai ciri-ciri tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun relatif tinggi, demikian pula tingkat belanja modal relatif rendah.

Kuadran IV adalah kuadran yang terletak pada kanan bawah mempunyai ciri-ciri tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun relatif rendah, sedangkan

	tingkat	belanja	modal	relatif	rendah.
Pertumbuhan Ekonomi					
		III	I		
		IV	II		
		Belanja modal			

### Belanja modal dan tingkat kemiskinan

Kuadran I adalah kuadran yang terletak pada kanan atas ciri-ciri tingkat kemiskinan relatif tinggi dan tingkat belanja modal relatif tinggi pula.

Kuadran II adalah kuadran yang terletak pada kiri atas mempunyai ciri-ciri tingkat kemiskinan relatif rendah, sedangkan tingkat belanja modal relatif tinggi.

Kuadran III adalah kuadran yang terletak pada kiri bawah mempunyai ciri-ciri tingkat kemiskinan relatif tinggi, demikian pula tingkat belanja modal relatif rendah.

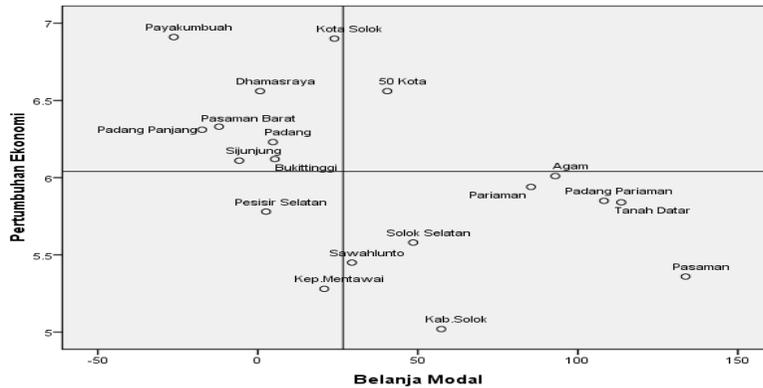
Kuadran IV adalah kuadran yang terletak pada kanan bawah mempunyai ciri-ciri tingkat kemiskinan relatif rendah, sedangkan tingkat belanja modal relatif rendah.

Tingkat kemiskinan		III	I
		IV	II
		Belanja modal	

## HASIL DAN PEMBAHASAN

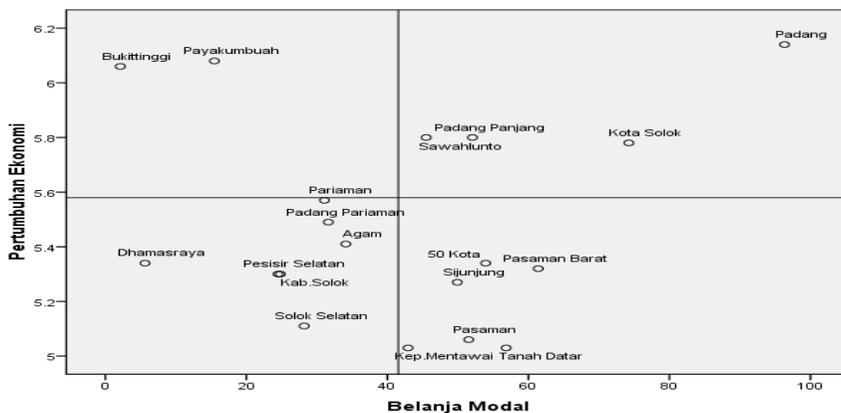
### Klasifikasi wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berdasarkan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.

Pemetaan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menurut belanja modal dan pertumbuhannya selama tahun 2011-2016, menghasilkan kelompok yang terdiri dari kuadran I kelompok ideal yang mempunyai belanja modal dan pertumbuhan ekonomi daerahnya tinggi, kuadran II kelompok belum ideal yang belanja modalnya tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi rendah, kuadran III kelompok yang baik belanja modal rendah pertumbuhan ekonomi tinggi dan kuadran IV kelompok yang paling buruk yaitu belanja modal dan pertumbuhan ekonomi daerahnya rendah.



**Gambar 1 Klasifikasi Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2011.**

Gambar 1 menunjukkan Keadaan ekonomi tiap kabupaten/kota yang telah di kelompokkan dengan data laju pertumbuhan ekonomi dan data pertumbuhan belanja modal, pada tahun 2011 dan dianalisis dengan Tipologi Klassen dapat dilihat dari tabel 4.8, dimana ada 1 kabupaten/kotapada Kuadran I yaitu ditempati oleh Kabupaten 50 Kota, 8 kabupaten/kota pada Kuadran II yaitu ditempati oleh Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, KabupatenSolok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto, 8 kabupaten/kota pada Kuadran III yaitu ditempati oleh Kabupaten Dharmasraya, KabupatenPasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kota Padang, Kota Padang panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Solok, dan 2 kabupaten pada Kuadran IV yaitu ditempati olehKabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan di provinsi Sumatera Barat.



**Gambar 2 Klasifikasi Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2016.**

Pada tahun 2016 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang terdapat pada kuadran Iartinya kobupaten/kota ini memiliki kondisi yang ideal yaitu berada pada kondisi pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dan belanja modal di atas rata-rata provinsi terdapat 4 kabupaten/kota yaitu

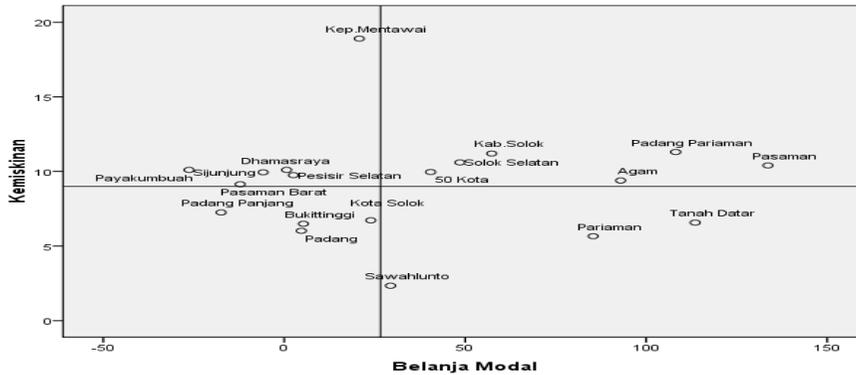
kota Padang, kota Solok, kota Sawahlunto dan kota Bukittinggi. Hal ini sesuai dengan teori *keynes* yang menyatakan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan nasional atau kenaikan dari pengeluaran pemerintah, secara langsung akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa.

Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2016 tetap berada pada kuadran II, dimana belanja modal tinggi tetapi tidak meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Hal ini disebabkan belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja jalan terkadang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas hal ini sesuai dengan UNDP (2007) bahwa belanja modal membutuhkan waktu yang lebih panjang dari lima tahun dan dampak tersebut sangat dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan dana. Apriana (2010) Alokasi anggaran belanja modal yang tidak tepat sasaran adalah salah satu faktor penyebab daerah kurang produktif dalam penyaluran dananya. Dana yang dikeluarkan tidak menambah kekayaan tetapi justru menjadi beban DAU. Devarajan (1996) hubungan antara komponen modal dari belanja publik dan pertumbuhan per kapita adalah negatif. Dengan demikian, pengeluaran yang tampaknya produktif, jika digunakan secara berlebihan, bisa menjadi tidak produktif. Hasil ini menyiratkan bahwa pemerintah negara berkembang telah salah mengartikan pengeluaran publik yang mendukung pengeluaran barang modal dengan mengorbankan pengeluaran lainnya. Kabupaten/kota pada kuadran III mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu ditempati oleh Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi.

Kabupaten/Kota yang termasuk pada kuadran IV terdapat 7 kabupaten/kota yaitu di tempati oleh Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman, dimana belanja modal rendah dengan pertumbuhan ekonomi rendah hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, dimana ketika belanja modal meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, begitu pula sebaliknya ketika belanja modal menurun maka pertumbuhan ekonomi juga menurun.

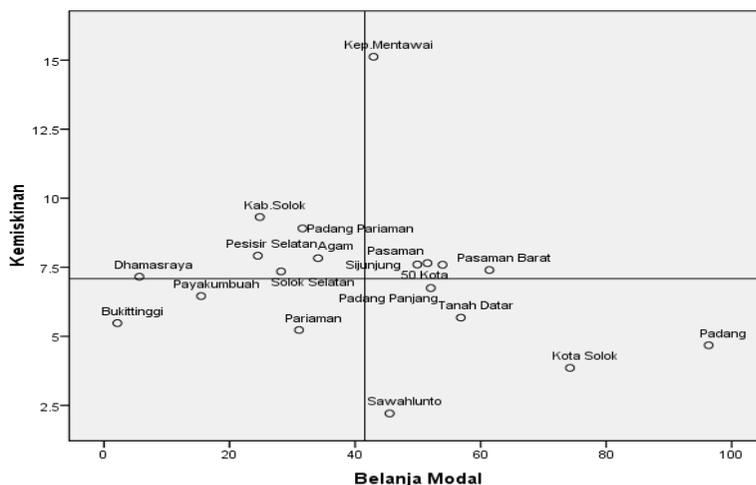
### **Klasifikasi wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berdasarkan belanja modal dan tingkat kemiskinan.**

Pemetaan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menurut belanja modal dan tingkat kemiskinan selama tahun 2011-2016, menghasilkan kelompok yang terdiri dari kuadran I kelompok belum ideal yang mempunyai belanja modal dan tingkat kemiskinan daerahnya tinggi, kuadran II kelompok ideal yang belanja modalnya tinggi tetapi tingkat kemiskinan rendah, kuadran III kelompok yang paling buruk belanja modal rendah dan tingkat kemiskinan tinggi dan kuadran IV kelompok yang baik yaitu belanja modal dan tingkat kemiskinan daerahnya rendah.



**Gambar 3 Klasifikasi Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2011.**

Gambar 3 menunjukkan keadaan tingkat kemiskinan tiap kabupaten/kota yang telah di kelompokkan dengan data tingkat kemiskinan dan data pertumbuhan belanja modal, pada tahun 2011 dan dianalisis dengan Tipologi Klassen dapat dilihat dari tabel 4.15, dimana ada 6 kota pada Kuadran I yaitu ditempati oleh Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Solok ,3 kabupaten/kota pada Kuadran II yaitu ditempati oleh Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto, 6 kabupaten/kota pada Kuadran III yaitu ditempati oleh Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh, dan 4 kabupaten pada Kuadran IV yaitu ditempati oleh Kota Padang, Kota Padang panjang, Kota Solok dan, Kota Bukittinggidi provinsi Sumatera Barat.



**Gambar 4 Klasifikasi Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2016.**

Pada tahun 2016 keadaan setiap kabupaten/kota yang telah di kelompokkan dengan data belanja modal dan data tingkat kemiskinan, dimana

kuadran I berkurang menjadi 5 kabupaten/kota dari tahun 2011 yaitu ditempati oleh Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan

Kabupaten Sijunjung, dimana kuadran I adalah wilayah yang belum ideal karena dengan tingginya belanja modal tidak dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik yang masih kurang memadai di beberapa daerah dan adanya kesalahan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana pengelolaan yang dimaksud baik dari segi peruntukannya yang tidak berpihak pada penduduk miskin, dimana pembangunan yang dilakukan tidak dirasakan oleh semua masyarakat sehingga tidak tercapainya penurunan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut. Selain itu, Lukman Hakim (2014) terdapat fenomena dalam pencairan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana dapat diamati bahwa hampir seluruh realisasi APBD pada pemerintah daerah terutama belanja infrastruktur terjadi penumpukan pencairan di triwulan III dan IV (Juli-Desember), sedangkan pada triwulan I dan II (Januari-Juni) terbilang sepi dari perputaran dana APBD yang juga bisa menyebabkan perlambatan dampak belanja modal. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan lamanya proses pelelangan yang harus dilakukan serta tidak adanya perencanaan kas (cash forecasting) yang memadai, sehingga banyak dana yang tersedia dalam jangka waktu yang cukup lama tersimpan di kas daerah dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kuadran II masih tetap sama 5 kabupaten/kota yaitu ditempati oleh Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang. Berdasarkan kelompok kuadran II tersebut dapat diketahui kabupaten/kota yang mengalami peningkatan pada belanja modal dan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan.

Alokasi belanja modal daerah yang semakin besar mencerminkan bahwa daerah semakin memprioritaskan keuangannya untuk belanja fisik yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat.

Kuadran III berkurang menjadi 6 kabupaten/kota yaitu ditempati oleh Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Payakumbuh. Pada wilayah Kuadran III Kabupaten/Kota belum bisa mengurangi tingkat kemiskinan karena rendahnya belanja modal pada daerah tersebut.

Kuadran IV hanya 3 kabupaten/kota yaitu ditempati oleh Kota Pariaman, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh.

Pengeluaran pemerintah di bidang belanja modal memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan membantu tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Dengan demikian belanja modal dapat dikatakan sebagai suatu hal yang sangat perlu diperhatikan, karena pengeluaran pemerintah akan mendorong kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat sebagai sampel, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemetaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal dengan kemiskinan. Menggunakan analisis tripologi klassen adalah pengelompokan berdasarkan 4 kuadran, dimana menghasilkan kelompok yang terdiri dari kuadran I kelompok ideal yang mempunyai belanja modal dan pertumbuhan ekonomi daerahnya tinggi, kuadran II kelompok belum ideal yang belanja modalnya tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi rendah, kuadran III kelompok yang baik belanja modal rendah pertumbuhan ekonomi tinggi dan kuadran IV kelompok yang paling buruk yaitu belanja modal dan pertumbuhan ekonomi daerahnya rendah, dimana pengelompokan berdasarkan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi menghasilkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada pada kuadran IV kelompok yang paling buruk, dimana belanja modal rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten PadangPariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Pariaman. Selanjutnya pengelompokan berdasarkan belanja modal dengan kemiskinan menghasilkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada pada kuadran I kelompok belum ideal, dimana belanja modal yang tinggi belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Pengeluaran pemerintah harus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah dituntut berperan aktif dalam memberikan fasilitas fisik atau infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pemerintah harus lebih serius dalam mengontrol pengeluaran belanja modal agar dana yang dikeluarkan terealisasi dan tepat sasaran sehingga dapat menurunkan jumlah penduduk miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rahma dkk. 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat*: Jurnal Analisis, Volume 4, Nomor 2, Desember 2015: Halaman 183-189
- Arwati, Dini. 2013. "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat*". Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2013, ISBN : 979-26-0266-6.
- Ayogu, 2007. Infrastructure and economic development in Africa: a review J. Afr. Econ., 16 (Suppl. 1) (2007), pp. 75-126 AERC
- Badan Pusat Statistik. *Sumatera Barat Dalam Angka 2011-2015*. BPS Sumatera Barat. Padang.
- Bappenas. 2003. *Peta kemampuan Keuangan Provinsi Dan Era Otonomi*.

- Cruz Marcio. 2017. *On the impact of demographic change on economic growth and poverty*: Journal Analysis, Volume 105, December 2017, Pages 95-106
- Dihan Lucky. 2013. Analysis Of The Effect Of Regional Performance To Economic Growth and Proverty Through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 4, No. 19, 2013. (<http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/viewFile/9804/9989>), diakses pada tanggal 15 Januari 2017.
- Dina Apriana. 2010. Analisis Hubungan antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali). Jurnal Akutansi dan Investasi, Volume 11 No. 1, halaman: 68-79, Januari 2010.
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Johan Holmgren. 2016. *analysis of the relationship between infrastructure and economic growth*: Journal Analysis, Volume 63, Agustus 2017, Pages 13-26.
- Kuncoro, Murdijat. 2006. "*Ekonomi Pembangunan*". Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Maabuat Adrianus. 2016. *Pemetaan Wilayah Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara*: Juenal Agri-sosioekonomi, Volume 12 Nomor 2, Mei 2016, Pages 87-94.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi edisi keenam*. Jakarta : Erlangga
- Mosley et al, P. Mosley, J. Hudson, A. Verschoor Aid. 2004. Poverty Reduction and the new Conditionality Economic Journal, 113 (2004), pp. F217-F243
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media